

ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PADA KOPERASI WARGA YAYASAN PENDIDIKAN FARMASI BANDUNG

Diandra Firyal, Lely Savitri Dewi, Innas Susantira K, Iwan Mulyana, Arie Ismail
Warsodoedi

**Konsentrasi Keuangan Program Sarjana Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Koperasi Indonesia
Tahun 2025**

ABSTRACT

This study assesses the internal control system of Koperasi Warga Yayasan Pendidikan Farmasi (YPF) Bandung using the COSO framework: control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. A qualitative approach—semi-structured interviews with the chair and treasurer—was used to align actual practices with COSO principles. Findings show improvements in control activities, notably the use of standardized loan application forms, treasurer verification, and chair authorization, as well as restricted custody of cash and documents. Monitoring occurs through routine reviews of lending and member savings. However, key weaknesses persist: the cooperative lacks formal legal status, risk assessment is not yet systematic, and transparency for non-members remains limited to on-site access. Overall, the internal control system is evolving in a positive direction, particularly around lending procedures and ongoing oversight, but requires reinforcement in legal compliance, structured risk management, and broader information transparency to ensure operational reliability, protect assets, and sustain member trust..

Keywords: Internal Control, Cooperative, COSO Framework

I. PENDAHULUAN

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi dalam hal efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Pengendalian

internal diperlukan bagi setiap organisasi baik sektor swasta, *profit oriented* serta perusahaan besar maupun skala kecil, begitu juga badan usaha koperasi yang pendiriannya diharapkan dapat mensejahterakan anggota koperasi khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Dalam sistem pengendalian internal didukung oleh beberapa unsur terkait satu dengan yang lainnya, mencakup lima komponen utama yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kelima komponen ini menjadi acuan penting dalam sistem pengendalian yang mampu menjaga keandalan informasi keuangan dan efisiensi operasional. Mulyadi (2016), menyatakan ada beberapa unsur pada pengendalian internal yaitu pemisahan tanggung jawab dengan tegas atas fungsional, adanya sistem wewenang serta prosedur pencatatan dalam rangka perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya, serta praktik yang sehat pada pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit organisasi dan karyawan sesuai kualitas dengan tanggung jawabnya.

Lemahnya pengendalian internal sering kali menjadi sumber dari berbagai permasalahan keuangan dalam sebuah entitas, baik skala besar maupun kecil. Minimnya prosedur pengawasan, tidak adanya pemisahan tugas, serta kurangnya dokumentasi yang memadai dapat mengakibatkan ketidakteraturan dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, penerapan komponen pengendalian internal yang komprehensif seperti yang dirumuskan pada kerangka COSO menjadi sangat penting, bahkan untuk badan usaha koperasi.

Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang secara sukarela memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Koperasi bertanggung jawab dalam mengelola dana anggota secara transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk koperasi yang umum dibentuk di lingkungan sekolah atau komunitas adalah koperasi karyawan, seperti Koperasi Warga Yayasan Pendidikan Farmasi. Meski lingkupnya relatif kecil, pengelolaan keuangannya tetap membutuhkan sistem pengendalian yang terstruktur agar aktivitas pencatatan transaksi berjalan tertib, aset koperasi terlindungi, dan informasi keuangan dapat

dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kajian koperasi ini dibuat untuk menilai potensi risiko yang mungkin timbul akibat lemahnya pengendalian, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar akuntansi koperasi dapat lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Penelitian Terdahulu

Maidani, (2020) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengendalian Internal Koperasi Simpan Pinjam Ubhara Jaya dengan menggunakan data yang diperoleh dari koperasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal koperasi ubharajaya belum berjalan baik, hal ini terlihat dari struktur organisasi dan jobdesk yang belum jelas, mutu karyawan belum cukup baik.

Selain itu, penelitian Wahyudin (2024) dengan judul Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Koperasi Simpan Pinjam Se Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan kondisi pengendalian internal pada koperasi Rinjani Perkasa, Koperasi Harapan Bersama, dan Koperasi Bina. Berdasarkan hasil penelitian seluruh komponen sistem pengendalian internal yang dirumuskan COSO 2013 telah diterapkan baik.

II. Tinjauan Pustaka

Definisi Koperasi

Jika melihat dari katanya, koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperation* atau dalam bahasa Belanda *cooperative* yang artinya kerja sama. Koperasi merupakan salah satu organisasi ekonomi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan, hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Melihat dari dasar hukumnya, pengertian koperasi menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992 “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Maka dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu badan usaha beranggotakan orang seorang secara sukarela, dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Koperasi tidak berorientasi pada keuntungan semata, tetapi lebih menekankan pada kerja sama, partisipasi aktif anggota, dan prinsip keadilan sosial. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama tanpa memandang besarnya modal yang disertakan. Seluruh kegiatan koperasi dilandaskan pada asas kekeluargaan.

Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi adalah ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi sehingga dapat dikatakan sebagai “*rules of the game*” dalam kehidupan koperasi karena sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi. Menurut Munkner, prinsip-prinsip koperasi meliputi:

1. Menolong diri sendiri berdasarkan kesetiakawanan.
2. Demokrasi.
3. Kekuatan modal tidak diutamakan.
4. Ekonomi.
5. Kebebasan.
6. Keadilan.
7. Memajukan kehidupan sosial melalui pendidikan.

Berdasarkan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Munkner, dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang dibangun di atas landasan sosial yang kuat, bukan semata-mata berorientasi pada keuntungan finansial. Prinsip seperti menolong diri sendiri atas dasar kesetiakawanan, demokrasi serta tidak mengutamakan kekuatan modal, menunjukkan bahwa koperasi menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan partisipasi aktif anggotanya. Selain itu, prinsip kebebasan, keadilan, dan peran pendidikan dalam memajukan kehidupan sosial mempertegas bahwa koperasi

bukan hanya sarana ekonomi, melainkan wadah dalam pembentukan karakter. Prinsip ini menjadi jati diri koperasi sekaligus pedoman dalam menjaga eksistensinya sebagai lembaga ekonomi rakyat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Nilai-Nilai Koperasi

Nilai-nilai koperasi yang meliputi nilai menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokratis, persamaan kejujuran, keterbukaan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain diharapkan akan menuntun dan diimplementasikan oleh anggota koperasi dalam menjalankan koperasinya. Setiap nilai koperasi memiliki makna khusus yang menjadi kekuatan gerakan koperasi yang menjadikan koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya. Nilai-nilai tersebut diantaranya:

1. Kekeluargaan, artinya kepemilikan dan pengelolaan banyak dilakukan oleh anggotanya sendiri.
2. Menolong diri sendiri, artinya motif kerja sama antar orang dalam wadah koperasi adalah menggalang potensi guna menghimpun kekuatan untuk memecahkan masalah bersama.
3. Bertanggung jawab, artinya mengendalikan seluruh kegiatan koperasi, termasuk memimpin, mengkoordinir, dan mengontrol jalannya aktivitas koperasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya.
4. Demokrasi, artinya pengelolaan koperasi harus didasarkan atas kehendak anggota yang ditetapkan melalui rapat anggota, kemudian dilakukan oleh anggota melalui pengurus dan ditujukan untuk kepentingan anggota.
5. Persamaan, artinya setiap anggota memiliki hak yang sama tanpa memandang besar atau kecilnya simpanan yang dimiliki oleh setiap anggota.
6. Kemandirian, artinya anggota koperasi memiliki cita-cita kemandirian dalam memecahkan permasalahan bersama di satu pihak dan lain pihak dalam menentukan haluan koperasi.

Selain nilai-nilai tersebut, adapun nilai-nilai yang diyakini oleh anggota koperasi, antara lain:

1. Kejujuran, artinya koperasi harus jujur kepada anggotanya baik menyangkut soal kualitas barang yang dijual atau ketepatan timbangan. Kepercayaan anggota akan tumbuh dan meningkatkan rasa ikut memiliki anggota terhadap koperasi dan hal tersebut akan meningkatkan partisipasi anggota dalam mengembangkan koperasi.
2. Keterbukaan, artinya bagi anggota sebagai pemilik, seluruh kegiatan kehidupan koperasi tidak ada yang bersifat rahasia.
3. Tanggung jawab, artinya koperasi tidak tinggal diam melainkan merasa memiliki tanggung jawab dalam ikut memecahkan masalah aktual yang dihadapi oleh masyarakat secara seutuhnya.
4. Kepedulian terhadap orang lain, artinya koperasi peduli terhadap orang-orang yang tinggal di sekitar koperasi.

Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem pengelolaan organisasi yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara pemangku kepentingan, manajemen, dan pihak terkait lainnya dengan tujuan menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan. GCG menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran (fairness) dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Penerapan GCG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi organisasi, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta menjaga kepercayaan stakeholder. Dengan demikian, GCG menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang sehat, beretika, dan berorientasi jangka panjang.

The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission atau COSO adalah kerangka pengendalian internal yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 dan telah diadopsi serta diimplementasikan di banyak organisasi dan negara. COSO mengeluarkan penyempurnaan atas

kerangka pengendalian internal pada tahun 2013 dengan memperjelas kriteria yang ada dan menambahkan 17 prinsip dan 81 atribut.

Dengan berpedoman pada enam kerangka utama dan 17 prinsip, organisasi dapat mendesain, mengimplementasi, memelihara serta menilai kecukupan sistem internalnya. Dalam konteks koperasi, penerapan kerangka pengendalian internal seperti yang dikembangkan COSO menjadi penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan koperasi. Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan bagian penting dari praktik akuntansi yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap proses dan aktivitas, seperti simpan pinjam, pencatatan transaksi, hingga penyusunan laporan keuangan koperasi, dilakukan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Fitriyah (2020), SPI juga dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau kecurangan serta meningkatkan kepercayaan anggota terhadap pengelolaan koperasi. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip COSO, koperasi dapat memperkuat struktur organisasinya dan menjamin reliabilitas informasi keuangan.

Sistem Pengendalian Internal

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) memberi definisi seperti berikut:

“sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah diterapkan”.

Sejalan dengan pengertian pengendalian internal menurut COSO (2013) adalah:

“internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance”.

Dengan kata lain, pengendalian internal merupakan proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan personel lain dalam perusahaan, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai atas pencapaian tujuan operasi, pelaporan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Mulyadi (2014) berpendapat bahwa, “pengendalian internal adalah struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terjadinya kebijakan manajemen”.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan sistem atau prosedur yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dirancang terkoordinasi untuk memberikan keyakinan memadai mengenai kehandalan pelaporan keuangan, melindungi aset perusahaan dan meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan pengendalian internal menurut COSO (2013), sebagai berikut:

1. Efektivitas dan efisiensi operasi

Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari semua operasi perusahaan sehingga dapat mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Keandalan atau reliabilitas pelaporan keuangan

Bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan data serta catatan-catatan akuntansi dalam bentuk laporan keuangan dan laporan manajemen, sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan tersebut dan dapat diuji kebenarannya.

3. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan ketaatan entitas terhadap hukum-hukum dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, pembuat aturan terkait, maupun kebijakan-kebijakan entitas itu sendiri.

Komponen Pengendalian Internal

Komponen pengendalian internal menurut COSO dalam buku Winarno (2006), yaitu:

1. Lingkungan pengendalian internal (*control environment*)

Lingkungan pengendalian internal merupakan sarana dan prasarana suatu organisasi atau perusahaan untuk menjalankan sistem pengendalian internal yang baik. Tanpa adanya lingkungan pengendalian internal yang baik, sistem pengendalian internal yang sangat bagus pun tidak dapat dijalankan dengan baik. Komponen-komponen yang mempengaruhi lingkungan pengendalian internal adalah:

- a. Komponen manajemen terhadap nilai etika dan integritas. Dalam koperasi, hal ini dapat tercermin dalam kepemimpinan koperasi yang menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam mengelola dana anggota.
- b. Gaya operasional yang dipakai oleh manajemen dan filosofi yang dianut manajemen. Dalam koperasi, hal ini dapat tercermin dalam kepemimpinan koperasi yang demokratis dan melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan, sesuai prinsip koperasi.
- c. Struktur organisasi, dengan adanya susunan organisasi koperasi yang jelas, termasuk pemisahan fungsi antara pengurus, pengawas, dan manajer operasional.
- d. Komite audit untuk dewan direksi. Dalam koperasi, fungsi ini dijalankan oleh pengawas koperasi yang bertugas melakukan audit internal dan memberikan laporan kepada anggota.
- e. Metode pembagian tanggungjawab dan tugas, seperti pemisahan tugas antara bagian administrasi, dan pencatatan keuangan untuk mencegah kesalahan pencatatan.
- f. Kebijakan dan praktik yang menyangkut sumber daya manusia. Dalam koperasi, hal ini tercermin dalam pelatihan

pegawai koperasi yang dilakukan berdasarkan kompetensi dan integritas, serta evaluasi kinerja secara periodik.

- g. Pengaruh dari luar, khususnya terhadap regulasi pemerintah. Seperti Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2. Kegiatan pengendalian (*control activities*)

Kegiatan pengendalian merupakan tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Menurut COSO terdapat beberapa kegiatan pengendalian yang diterapkan oleh perusahaan, yaitu:

- a. Pemberian otorisasi atas transaksi dan kegiatan. Setiap transaksi keuangan, seperti pencairan pinjaman atau pembelian aset, harus mendapat persetujuan dari pengurus atau pengawas koperasi.
- b. Pembagian tugas dan tanggung jawab, seperti pemisahan fungsi antara pencatat transaksi, kasir, dan pengawas untuk mencegah kecurangan.
- c. Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang baik. Koperasi menggunakan dokumen standar seperti kwitansi, buku catatan transaksi harian anggota, dan laporan keuangan yang dibukukan secara berkala.
- d. Perlindungan yang cukup terhadap kekayaan dan catatan perusahaan. Dalam koperasi, uang kas, inventaris, atau dokumen penting disimpan di tempat yang aman dan hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang.
- e. Pemeriksaan independen terhadap kinerja perusahaan. Dalam koperasi, pemeriksaan keuangan dan operasional dilakukan oleh pengawas koperasi secara berkala atau melalui audit dari pihak eksternal.

3. Penilaian risiko (*risk assesment*)

Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Perusahaan harus bisa mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi kerugian-kerugian yang mungkin timbul. Terdapat tiga kelompok risiko yang dihadapi oleh perusahaan, yaitu:

- a. Risiko strategi, dalam pengendalian internal, risiko ini berkaitan dengan sejauh mana tujuan strategis koperasi dirancang secara realistis dan dilaksanakan pengawasan yang memadai.
- b. Risiko finansial, berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor keuangan seperti fluktuasi nilai tukar, suku bunga, kredit macet, kesalahan pelaporan keuangan, atau penyalahgunaan aset koperasi.
- c. Risiko informasi, mencakup risiko yang muncul akibat ketidakakuratan, keterlambatan, atau kebocoran informasi penting yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*)

Informasi sangat penting bagi setiap karyawan untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang relevan dan komunikasi yang efektif sangat penting agar seluruh pihak dalam koperasi baik pengurus, pengawas, maupun anggota dapat memahami tugas, tanggung jawab, serta prosedur yang berlaku. Dalam koperasi hal ini tercermin dalam:

- a. Penyampaian informasi keuangan secara rutin kepada anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- b. Pengurus menyampaikan prosedur simpan pinjam dan ketentuan baru secara jelas kepada anggota.

- c. Adanya grup komunikasi untuk menyebarkan informasi kebijakan koperasi.

5. Pemantauan (*monitoring*)

Pemantauan merupakan evaluasi mengenai suatu kegiatan berjalan dengan sesuai atau tidaknya dengan apa yang diharapkan dan dapat diambil tindakan secepatnya. Evaluasi dilakukan dengan beberapa bentuk, apakah sifat berkelanjutan, terpisah maupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima komponen tersebut mempengaruhi fungsi-fungsi dalam setiap komponen. Pemantauan dapat dilakukan secara berkelanjutan oleh pengurus maupun secara terpisah oleh pengawas secara periodik. Dalam koperasi hal ini tercermin dalam:

- a. Pelaksanaan audit internal oleh pengawas koperasi untuk memastikan kesesuaian antara pencatatan dan realisasi.
- b. Evaluasi rutin oleh pengurus terhadap kegiatan simpan pinjam, pembukuan, dan kas harian.
- c. Peninjauan kembali atas sistem dan kebijakan koperasi berdasarkan masukan anggota atau hasil audit.

III. METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan secara kualitatif dengan melakukan wawancara langsung kepada ketua koperasi dan Bendahara koperasi, guna menggali kondisi nyata pengendalian internal pada koperasi warga YPF.

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi langsung pada Koperasi Warga YPF sebagai objek penelitian dengan melakukan wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan dengan sistematis yang berlandaskan pada tujuan penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara pengendalian internal yang ada pada koperasi dengan pengendalian internal yang sesuai menurut teori menggunakan lima komponen COSO.

1. Lingkungan pengendalian.
2. Kegiatan pengendalian.
3. Penilaian risiko.
4. Informasi & komunikasi.
5. Pemantauan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Handayani (2020) mengungkapkan panjang atau pendek umur koperasi dikarenakan lemahnya sistem pengendalian internal pada koperasi itu sendiri atau bisa dikatakan sistem pengendalian internal merupakan faktor utama kepailitan atau kebangkrutan yang terjadi pada koperasi. Adapun lima komponen pengendalian internal menurut COSO pada Koperasi Warga YPF:

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap, kesadaran, dan tindakan pengurus serta anggota koperasi dalam menjalankan nilai-nilai integritas, etika, dan profesionalisme. Komponen yang mempengaruhi lingkungan pengendalian pada Koperasi Warga YPF adalah sebagai berikut:

- a. Komponen manajemen terhadap nilai etika dan integritas: pada Koperasi Warga YPF, prinsip keterbukaan mengenai keuangan kepada anggota telah diterapkan melalui penyampaian informasi keuangan pada rapat anggota. Sudah mendukung tujuan SPI, khususnya keandalan laporan keuangan dan efektivitas operasional.
- b. Gaya operasional dan filosofi manajemen: Koperasi Warga YPF menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis dengan

melibatkan anggota dalam keputusan penting, terutama yang menyangkut kebijakan simpan pinjam dan penggunaan dana koperasi. Sudah mendukung tujuan SPI, yaitu efektivitas dan efisiensi operasional.

- c. Struktur organisasi: Koperasi Warga YPF telah memiliki struktur organisasi yang jelas. Sudah mendukung tujuan SPI, terutama efektivitas operasional.
- d. Komite audit atau fungsi pengawasan: fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh pengawas koperasi pada Koperasi Warga YPF sebagian besar diambil alih oleh ketua koperasi, sehingga independensi fungsi pengawasan kurang. Belum mendukung tujuan SPI, khususnya keandalan laporan keuangan dan kepatuhan regulasi.
- e. Metode pembagian tanggung jawab dan tugas: pembagian tugas pada Koperasi Warga YPF telah diterapkan sesuai struktur organisasi, namun pada praktiknya beberapa tugas pengawasan dan administrasi masih terpusat pada ketua, sehingga berpotensi menurunkan efektivitas pengendalian. Belum sepenuhnya mendukung tujuan SPI, khususnya efektivitas operasional.
- f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia: Koperasi Warga YPF belum melaksanakan pelatihan khusus bagi pengurus, sehingga peningkatan kompetensi terkait tata kelola dan pengendalian internal belum optimal. Belum mendukung tujuan SPI, khususnya efektivitas & efisiensi operasional serta kepatuhan tata kelola.
- g. Pengaruh dari luar khususnya regulasi pemerintah: Koperasi Warga YPF belum memiliki badan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang berdampak pada legitimasi dan perlindungan hukum koperasi di mata pemerintah dan mitra kerja. Belum mendukung tujuan SPI, khususnya kepatuhan hukum/regulasi dan legitimasi kelembagaan.

Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola potensi masalah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan koperasi. Pada Koperasi Warga YPF, tahun ini telah terjadi peningkatan pada prosedur peminjaman dibandingkan tahun sebelumnya. Jika sebelumnya pengajuan pinjaman dilakukan secara langsung tanpa bukti tertulis yang memadai, kini peminjam diwajibkan mengisi formulir pengajuan pinjaman yang telah disediakan. Formulir tersebut diverifikasi terlebih dahulu oleh bendahara, kemudian diteruskan kepada ketua untuk ditinjau dan diberikan persetujuan. Selain itu, pada tahun ini juga telah diberlakukan sistem batas (limit) pinjaman untuk mengurangi potensi pinjaman berlebih pada setiap anggota. Kebijakan ini berkaitan dengan risiko strategi dan risiko finansial, karena bertujuan menjaga keberlanjutan usaha koperasi sekaligus meminimalisir kemungkinan terjadinya kredit macet.

Seiring dengan penerapan sistem limit pinjaman, koperasi juga melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota mengenai prosedur baru ini. Langkah sosialisasi tersebut termasuk dalam risiko informasi, yang ditujukan untuk meminimalisir kesalahpahaman anggota terhadap kebijakan baru serta memastikan semua pihak memahami batasan dan ketentuan pinjaman yang berlaku. Sudah mendukung tujuan SPI, terutama dalam hal keandalan laporan keuangan dan efektivitas operasional.

Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan arahan manajemen dijalankan dengan baik. Komponen yang mempengaruhi kegiatan pengendalian pada Koperasi Warga YPF adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian otorisasi atas transaksi dan kegiatan: Pada Koperasi Warga YPF, pemberian pinjaman kepada anggota harus mendapat persetujuan langsung dari ketua koperasi. Tahun ini telah terjadi

peningkatan pada prosedur peminjaman dibanding tahun sebelumnya. Jika sebelumnya pengajuan pinjaman dilakukan secara langsung tanpa bukti tertulis yang memadai, kini peminjam diwajibkan mengisi formulir pengajuan pinjaman yang telah disediakan. Formulir tersebut diverifikasi terlebih dahulu oleh bendahara kemudian diteruskan kepada ketua untuk ditinjau dan diberikan persetujuan. Perubahan ini meningkatkan akuntabilitas, dokumentasi, dan kepatuhan terhadap prosedur. Sudah mendukung tujuan SPI, khususnya pada efektivitas operasional dan kepatuhan.

- b. Pembagian tugas dan tanggung jawab: Pembagian fungsi telah dilakukan, di mana pencatatan seluruh transaksi keuangan menjadi tanggung jawab bendahara, sedangkan pengawasan terhadap jalannya kegiatan keuangan dipegang langsung oleh ketua koperasi. Belum sepenuhnya mendukung tujuan SPI, karena masih ada pemusatan fungsi pengawasan pada ketua sehingga efektivitas dan independensi berpotensi berkurang.
- c. Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang baik: Koperasi Warga YPF telah menggunakan dokumen pinjaman standar, seperti buku catatan transaksi anggota, untuk mencatat setiap kegiatan simpan pinjam secara tertib dan terdokumentasi. Sudah mendukung tujuan SPI, terutama pada keandalan pencatatan keuangan dan transparansi.
- d. Perlindungan terhadap kekayaan dan catatan koperasi: Uang kas dan dokumen penting disimpan oleh bendahara koperasi di tempat yang aman, dengan akses terbatas hanya kepada bendahara dan ketua koperasi. Hal ini bertujuan mencegah penyalahgunaan atau kehilangan aset koperasi. Sudah mendukung tujuan SPI, khususnya pada aspek perlindungan aset.
- e. Pemeriksaan independen terhadap kinerja koperasi: Pemeriksaan keuangan dan operasional dilakukan oleh pengawas koperasi yang dalam praktiknya dijabat langsung oleh ketua koperasi, sehingga

meskipun pemeriksaan tetap berjalan, fungsi independensinya menjadi terbatas. Belum mendukung tujuan SPI secara optimal, karena independensi pemeriksaan tidak terjaga dengan baik.

Informasi & Komunikasi

Komponen ini berkaitan dengan penyediaan dan pertukaran informasi yang relevan dan tepat waktu. Informasi yang relevan dan komunikasi yang efektif sangat penting agar seluruh pihak dalam koperasi, baik pengurus, pengawas, maupun anggota, memahami tugas, tanggung jawab, serta prosedur yang berlaku. Pada Koperasi Warga YPF, penyampaian informasi keuangan dilakukan secara rutin kepada anggota, salah satunya melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Selain itu, pengurus juga menyampaikan prosedur simpan pinjam dan ketentuan baru, termasuk penerapan sistem batas (limit) pinjaman, secara jelas kepada anggota.

Sebelum kebijakan limit pinjaman diberlakukan, koperasi telah melakukan sosialisasi agar seluruh anggota memahami tujuan kebijakan ini, yaitu untuk mengurangi risiko kredit macet dan menjaga keberlangsungan usaha. Kegiatan sosialisasi tersebut juga bertujuan meminimalisir kesalahpahaman yang dapat menimbulkan risiko informasi. Di luar rapat formal, koperasi memanfaatkan grup komunikasi internal untuk menyebarkan informasi terkait kebijakan baru, jadwal pembayaran, dan pelaporan keuangan. Akses informasi keuangan bagi anggota telah terbuka, namun untuk non-anggota, informasi hanya dapat diakses dengan mengunjungi langsung kantor koperasi. Hal ini sudah mendukung tujuan SPI karena keterbukaan informasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam meminimalisir risiko informasi yang bisa mengganggu efektivitas operasional, dan meskipun akses masih terbatas bagi non-anggota, namun untuk anggota keterbukaan sudah terjaga dengan baik.

Monitoring

Pemantauan merupakan proses evaluasi terhadap jalannya kegiatan koperasi untuk memastikan kesesuaian dengan prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan, serta memungkinkan tindakan korektif dilakukan secara cepat apabila ditemukan penyimpangan. Pada Koperasi Warga YPF, pemantauan dilakukan secara berkelanjutan oleh ketua koperasi, yang sekaligus merangkap sebagai pengawas, terhadap penyaluran pinjaman dan simpanan anggota setiap bulannya.

Selain itu, sejak diberlakukannya prosedur peminjaman baru yang mewajibkan penggunaan formulir pengajuan dan verifikasi berjenjang, ketua koperasi melakukan pengecekan rutin guna memastikan setiap pengajuan telah sesuai batas (limit) pinjaman yang ditetapkan. Pemantauan ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap kebijakan baru, tetapi juga meminimalkan risiko kredit macet dan menjaga stabilitas keuangan koperasi.

Evaluasi terhadap pembukuan, kas harian, serta kelancaran angsuran juga dilakukan secara periodik. Peninjauan kembali terhadap sistem dan kebijakan koperasi dilakukan berdasarkan masukan anggota yang diperoleh saat sosialisasi maupun rapat anggota. Meskipun fungsi pengawasan formal seharusnya dijalankan oleh pengawas, di Koperasi Warga YPF peran tersebut sepenuhnya dipegang oleh ketua koperasi karena keterbatasan sumber daya. Hal ini sudah mendukung tujuan SPI, karena monitoring rutin membantu mencegah penyimpangan sejak dini dan karena monitoring ini memastikan prosedur baru dijalankan konsisten dan risiko dapat dikendalikan.. namun dalam hal pemisahan fungsi, Kurang mendukung tujuan SPI, karena tidak ada pemisahan fungsi antara pengurus dan pengawas, sehingga independensi pengawasan belum terjaga sepenuhnya.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis menggunakan lima komponen pengendalian internal menurut COSO, Koperasi Warga YPF telah memiliki beberapa elemen pengendalian yang berjalan cukup baik, namun masih ditemukan kelemahan yang memerlukan perbaikan. Pada aspek lingkungan pengendalian, koperasi telah menerapkan keterbukaan dana kepada anggota, memiliki struktur organisasi yang jelas, dan melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan, tetapi belum memiliki badan hukum sehingga berisiko terhadap legitimasi dan perlindungan hukum. Pada penilaian risiko, telah terjadi perbaikan signifikan melalui penerapan prosedur peminjaman baru dan sistem batas (limit) pinjaman untuk mengurangi risiko strategi dan finansial, disertai sosialisasi kepada anggota guna meminimalkan risiko informasi.

Dari sisi kegiatan pengendalian, penggunaan dokumen pinjaman standar, pembagian tugas yang jelas, dan penyimpanan aset yang aman telah berjalan, meskipun fungsi pengawasan masih terpusat pada ketua sehingga independensinya kurang. Pada informasi dan komunikasi, akses informasi keuangan bagi anggota sudah baik melalui RAT dan grup komunikasi internal, tetapi untuk non-anggota masih terbatas. Pada pemantauan, ketua koperasi melakukan evaluasi rutin terhadap pinjaman, simpanan, pembukuan, dan kas, namun peran pengawasan formal belum optimal karena tidak adanya pengawas independen.

Secara keseluruhan, pengendalian internal Koperasi Warga YPF menunjukkan perkembangan positif, terutama pada prosedur peminjaman dan komunikasi dengan anggota, namun diperlukan penguatan pada legalitas, independensi pengawasan, serta manajemen risiko yang terdokumentasi untuk mendukung keberlanjutan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- (AICPA), A. I. (n.d.). *Internal Control*. Retrieved from <https://repository.stie-mce.ac.id/1149/3/BAB%20II.pdf>
- COSO. (2013). (*committee of sponsoring organization of the treadway commission*), *Internal Control - Intergrated Framework*.
- Dr. Subandi, M. (2009). *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Alfabeta.
- ICA. (n.d.). *International Cooperative Alliance*. Retrieved from Apa Itu Koperasi (diambil kembali dari International Cooperative Alliance): <https://ica.coop/>
- Indonesia, U.-U. R. (1992). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Maidani, H. (2020). Analisis Pengendalian Internal Koperasi Simpan Pinjam Ubhara Jaya.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*.
- Munkner. (1989). *Cooperative and Rural Development*.
- Wahyudin. (2024). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Koperasi Simpan Pinjam Se Kabupaten Lombok Timur.
- Winarno, W. (2006). *Sistem Informasi Akuntansi*.